

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam diduga menjadi faktor penting penyebab kerusakan lingkungan (Gumilar, 2012). Pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang semakin tinggi akan semakin mempercepat terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan tersebut terlihat jelas terutama di daerah pesisir yang pertumbuhan penduduknya dua kali lipat dari rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia (Suryanto, 2007).

Pantai Utara (pantura) Pulau Jawa merupakan area dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Tingginya aktivitas ekonomi menyebabkan tekanan bagi kelangsungan ekosistem di kawasan pesisir, termasuk mangrove. Fadel (2010) dalam Soeprbowati dan Suedy (2010) menyebutkan bahwa pantura Jawa Tengah dengan panjang pantai 325 km mengalami kerusakan mangrove terparah dibandingkan pantura Jawa Barat maupun Jawa Timur. Kerusakan mangrove tersebut telah mencapai 96,5 % (62,5 % rusak berat dan 32 % rusak ringan), sedangkan yang tidak rusak hanya sekitar 3,5 % (Puryono, 2009). Aksesibilitas menuju mangrove yang mudah dengan tersedianya sarana dan prasarana transportasi telah meningkatkan tekanan terhadap hutan mangrove.

Mangrove merupakan istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan tumbuhan berkayu yang hidup di pertemuan daratan dan lautan (Alongi, 2002). Dalam kehidupan sehari-hari, wilayah tersebut biasa dikenal dengan pesisir. Keseimbangan wilayah pesisir sangat dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi di laut seperti : pasang surut air laut, angin laut, dan intrusi air laut, maupun proses-proses yang terjadi di darat seperti : sedimentasi, aliran air tawar dan aktivitas manusia. Oleh karena itu, keberlangsungan mangrove sangat bergantung pada dinamika dari proses-proses tersebut.

Mangrove diyakini tidak hanya mampu menyediakan berbagai produk hutan yang berharga, namun keberadaannya juga memiliki peran penting bagi ekosistem lain yang berada di sekitarnya. Sebagai ekosistem yang produktif, mangrove memberikan sejumlah besar manfaat berdasarkan fungsi layanan

ekosistem yang dimilikinya. Menurut UNEP (2006), layanan ekosistem mangrove yang penting bagi kesejahteraan manusia antara lain : *provisioning services* (seperti penyedia produk kayu maupun kayu bakar, penghasil tanin, bahan baku obat-obatan, sumber makanan, bahkan sebagai penghasil madu), *regulating services* (seperti pencegah abrasi, pengendali banjir maupun intrusi air laut), *supporting services* (sebagai tempat bertelur maupun daerah asuhan bagi ikan dan spesies komersial lainnya), dan *cultural services* (seperti rekreasi dan keindahan). Kesemua fungsi layanan tersebut dapat berlanjut (diperoleh secara terus menerus) apabila keberadaan mangrove dapat dipertahankan dan pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.

Berdasarkan *Global Forest Resources Assessment 2010* disebutkan bahwa luas mangrove dunia mencapai 15,6 juta ha (FAO, 2010). Dibandingkan dengan negara lain, luas mangrove di Indonesia adalah yang terbesar di dunia, yaitu hampir 19 % dari luas mangrove dunia. Berdasarkan hasil pemetaan oleh Bakosurtanal tahun 2009, luas mangrove di Indonesia sekitar 3,2 juta ha yang tersebar di berbagai pulau (Hartini *et al.*, 2009).

Sumberdaya mangrove memiliki potensi pemanfaatan yang cukup tinggi. Keberadaan mangrove di negara berkembang memiliki peran yang cukup penting bagi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian bangsa. Di Indonesia, hutan mangrove telah dimanfaatkan oleh penduduk lokal sejak beberapa abad yang lalu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Beragam produk dapat dihasilkan oleh mangrove baik secara langsung maupun tidak langsung seperti : kayu bakar, bahan bangunan, keperluan rumah tangga, kertas, kulit, obat-obatan, dan perikanan. Melihat berbagai macam bentuk pemanfaatan tersebut, maka perekonomian pedesaan yang berada di kawasan pesisir seringkali sangat bergantung pada mangrove di sekitarnya. Dengan kata lain, kerusakan mangrove akan menjadi penghambat bagi pertumbuhan perekonomian desa pesisir.

Seiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan mangrove mengarah pada pemanfaatan komersial yang dilakukan secara besar-besaran, baik melalui perusahaan hutan mangrove untuk industri perkayuan, pertambakan bahkan pemukiman. Menurut Alongi (2002), penebangan hutan merupakan salah satu

bentuk eksploitasi secara komersial dari mangrove yang telah lama dilakukan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Giesen *et al.* (2006) bahwa penyebab utama hilangnya hutan mangrove di Asia Tenggara adalah konversi lahan untuk peruntukan lain.

Jika dibandingkan dengan beberapa dekade sebelumnya, luas mangrove dunia saat ini kurang dari jumlah sebelumnya. Duke *et al.* (2007) menyebutkan bahwa 1-2 % dari luas hutan mangrove menghilang setiap tahunnya. FAO (2010) menyebut Indonesia sebagai negara dengan kerusakan mangrove terbesar pada tahun 1990. Duke *et al.* (2007) menuliskan bahwa laju penurunan hutan mangrove di negara berkembang seperti Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Dari 4,25 juta ha pada tahun 1982, kemudian pada tahun 1990 luas hutan mangrove menjadi 3,5 juta ha dan pada tahun 2000 turun menjadi sekitar 2,9 juta ha (Giesen *et al.*, 2006). Lebih lanjut, Giesen *et al.* (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk dan pembangunan merupakan ancaman bagi wilayah pesisir, termasuk mangrove. Seperti ditulis oleh Choong *et al.* (1990) dalam Kathiresan dan Bingham (2001) bahwa sekitar 45 % mangrove di Indonesia telah mengalami degradasi cukup parah karena aktivitas manusia. Jumlah kerusakan tersebut diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pemukiman di kawasan pesisir (Alongi, 2002). Kegiatan lain seperti pembukaan tambak-tambak untuk budidaya perikanan juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kerusakan hutan mangrove.

Mengingat perannya yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat, maka penurunan luas mangrove harus segera ditangani dengan benar agar fungsinya dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu bentuk penanganan yang dapat dilakukan adalah rehabilitasi mangrove. Rehabilitasi merupakan kegiatan yang sengaja ditujukan untuk regenerasi pohon, baik secara alami maupun buatan, di atas lahan berupa padang rumput, semak belukar, atau wilayah tandus yang dulunya berhutan, dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas, penghidupan masyarakat, dan/atau manfaat jasa lingkungan (CIFOR, 2003 dalam Nawir *et al.*, 2008).

Rehabilitasi bukanlah sebuah fenomena yang baru. Upaya ini telah dilakukan sejak lama, namun tingkat keberhasilannya masih rendah. Sebagian besar program rehabilitasi dikendalikan oleh pemerintah (*top down*) dan umumnya terfokus pada aspek-aspek teknis. Pengaturan kelembagaan untuk melaksanakan program rehabilitasi secara efektif di lapangan belum dikembangkan, sehingga teknik rehabilitasi kurang diadopsi oleh masyarakat setempat. Menjelang akhir tahun 1990-an secara konseptual, rehabilitasi dilaksanakan dengan metode yang lebih partisipatif (Nawir *et al.*, 2008).

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan lingkungan yang terjadi dalam tiga puluh tahun terakhir diduga menjadi faktor pendukung keberhasilan rehabilitasi mangrove (Field, 1999). Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya laju kerusakan mangrove yang terjadi di Indonesia. Data FAO (2010) mencatat laju kerusakan mangrove rata-rata di Indonesia adalah sebesar 0,51 % per tahun pada periode 2000-2010. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan laju kerusakan mangrove rata-rata pada periode 1990-2000 yaitu sebesar 1,75 % per tahun.

Mangrove berperan dalam menjaga kestabilan garis pantai. Melalui sistem perakarannya yang rapat dan khas, mangrove mampu mempertahankan lahan yang telah dikolonisasi, terutama dari ombak dan arus laut. Penurunan luas mangrove secara tidak langsung berdampak pada peningkatan laju abrasi di wilayah pesisir. Sekitar 20 % dari garis pantai Indonesia mengalami kerusakan akibat abrasi yang terjadi setiap tahun (Dahuri *et al.*, 2001).

Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah rawan abrasi di pesisir pantura Jawa Tengah dengan tingkat kerusakan mangrove terparah kedua setelah Kabupaten Kendal. Data pada Bappedal Provinsi Jawa Tengah (2002) dalam BPDAS Pemali Jratun (2006) tercatat angka kerusakan mangrove di Kabupaten Rembang mencapai luas 103,715 ha. Penurunan luas tersebut disebabkan oleh eksploitasi berlebihan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setyawan dan Winarno (2006a) menyebutkan beberapa faktor penyumbang terbesar kerusakan ekosistem mangrove di pesisir Kabupaten Rembang, adalah : pertambangan, penebangan mangrove, reklamasi dan sedimentasi, serta

pencemaran lingkungan. Kismartini (2012) menambahkan bahwa minimnya keberadaan mangrove di pesisir Kabupaten Rembang bermula dari kegiatan masyarakat yang mengkonversi lahan mangrove menjadi tambak bandeng maupun udang windu.

Degradasi mangrove memerlukan perhatian yang serius tidak hanya dari pemerintah saja, namun juga masyarakat terutama yang tinggal di wilayah pesisir. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan upaya rehabilitasi. Program tersebut diharapkan mampu mengembalikan fungsi mangrove dalam menjaga keseimbangan di wilayah pesisir. Agar tujuan rehabilitasi mangrove dapat terwujud, pelaksanaannya memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat.

Dalam dekade terakhir, rehabilitasi mangrove di Kabupaten Rembang telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dengan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah (Hendarto dan Nitisuparjo, 2010). Menurut Kismartini (2012), saat ini mangrove telah tumbuh di sepanjang pesisir dengan lebar hamparan yang berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua masyarakat pesisir memiliki tingkat partisipasi yang sama terhadap upaya rehabilitasi yang dilakukan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat di setiap desa pesisir perlu ditingkatkan pada level yang sama baiknya sehingga rehabilitasi mangrove dapat dilakukan secara optimal.

1.2. Perumusan Masalah

Pemulihan ekosistem mangrove melalui rehabilitasi di Kabupaten Rembang telah dilakukan sejak lama. Namun demikian, diduga masyarakat desa pesisir memiliki tingkat partisipasi yang berbeda-beda terkait upaya tersebut.

Pertanyaan yang akan di jawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi mangrove di desa pesisir Kabupaten Rembang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi mangrove di desa pesisir Kabupaten Rembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi mangrove di desa pesisir Kabupaten Rembang.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi mangrove di desa pesisir Kabupaten Rembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan dalam pelestarian mangrove di Kabupaten Rembang.
- b. Sebagai wahana berpikir sistematis pada pengungkapan problem praktis mengenai partisipasi masyarakat di Kabupaten Rembang.
- c. Pelengkap kepustakaan yang memberikan gambaran dan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi mangrove di Kabupaten Rembang.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Lokasi dan waktu pelaksanaan menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Harja (2001), Hardhani (2002), Saptorini (2003), dan Kismartini (2012).

Studi yang dilakukan oleh Harja (2001) berjudul “partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove (studi kasus di Desa Durian dan Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan)” merupakan penelitian deskriptif yang bersifat korelasional. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelestarian hutan mangrove. Dalam penelitian ini dilakukan determinasi faktor internal dan eksternal yang membedakan antara kedua lokasi penelitian. Hasil yang diperoleh adalah bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Durian

adalah lebih baik jika dibandingkan dengan masyarakat Desa Sidodadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi adalah keterlibatan pemerintah, pemahaman masyarakat tentang manfaat mangrove, manfaat mangrove baik langsung maupun tidak langsung, pendapatan, dan jumlah anggota keluarga. Nilai korelasi faktor tersebut secara berurutan adalah 0,85; 0,50; 0,46; 0,45; 0,31, dan 0,18. Kedua desa berbeda nyata untuk faktor eksternal, faktor internal, dan tingkat partisipasi.

Hardhani (2002) meneliti tentang “faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan”. Penelitian kualitatif yang diolah dengan metode statistik ini bertujuan untuk mengetahui tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini meliputi : (1) masyarakat telah berperan serta dalam pengelolaan hutan mangrove, dan (2) faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove adalah pendidikan, pendapatan, pengetahuan tentang mangrove, kebijaksanaan dan himbauan dari pemerintah daerah terkait.

Saptorini (2003) melakukan studi dengan judul “persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan konservasi hutan mangrove di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak”. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji kondisi hutan mangrove hasil rehabilitasi, persepsi masyarakat tentang mangrove, partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan mangrove dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas mangrove bertambah dari 7,5 ha pada tahun 1996 menjadi 33 ha pada tahun 2002 dengan dominasi jenis *Rhizophora mucronata*. Mangrove tersebut dikategorikan jelek pada pantai terbuka, sedang pada lokasi di dekat mangrove muda, dan baik pada saluran tambak. Persepsi masyarakat tentang mangrove tergolong cukup baik, yaitu sebagai pelindung dan penahan abrasi pantai. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan dan persepsi tentang mangrove.

Kismartini (2012) meneliti “implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Rembang”.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang. Hasil yang diperoleh adalah : (1) terdapat variasi interpretasi substansi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir antara pusat dengan Kabupaten Rembang, (2) Kawasan Bahari Terpadu (KBT) dan *sea front city* merupakan strategi pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang, (3) aktor dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang terdiri dari instansi pemerintah, swasta dan masyarakat, (4) Kabupaten Rembang telah mengimplementasikan kebijakan integrasi antar sektor sejak bergulirnya otonomi daerah, dan (5) hasil implementasi berdasarkan capaian terhadap indikator pembangunan berkelanjutan belum bisa mencapai keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dimensi ekonomi lebih dominan.